

---

## ANALISIS PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT DESA LABUHAN AJI DALAM PEMBERIAN SUARA PADA PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF TAHUN 2024

M.Ulfatul Akbar Jafar <sup>a</sup>, Ayatullah Hadi <sup>b</sup>, Cahyadi Kurniawan<sup>c</sup>

<sup>a,b,c</sup> Universitas Muhammadiyah Mataram, Mataram, Indonesia

E-mail: mulfatul.akbar@ummat.ac.id

---

### ABSTRAK

Pemilihan umum (Pemilu) merupakan program pemerintah setiap lima tahun sekali yang dilaksanakan diseluruh wilayah Negara Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami partisipasi politik masyarakat dalam pemilu legislatif di Desa Labuhan Aji, dan untuk mengetahui dan memahami hambatan atau kendala partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemilu legislatif di Desa Labuhan Aji. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif, teknik pengumpulan data dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian dari partisipasi masyarakat dalam pemilihan legislatif di Desa Labuhan Aji menunjukkan bahwa jumlah pemberian suara Desa Labuhan Aji mengalami penurunan bila dibandingkan dengan jumlah suara pada pemilihan sebelumnya. Pemilih di Desa Labuhan Aji mengikuti kegiatan kampanye karena ada acara hiburan dan mengharapkan adanya imbalan, namun masih minim dalam memperhatikan isu kampanye. Faktor penghambat dari partisipasi pemilih pemula maupun pemilih biasa adalah dikarenakan kesibukan aktifitas sehari-hari dan kekecewaan akan kinerja legislatif. Sedangkan faktor pendorong partisipasi pemilih pemula dan pemilih biasa adalah karena rasa ingin tahu dan kesadaran politik para pemilih.

**Kata Kunci:** *Partisipasi Politik, Pemberian Suara, Pemilihan Umum Legislatif.*

### ANALYSIS OF COMMUNITY POLITICAL PARTICIPATION IN VOTING IN THE 2024 LEGISLATIVE GENERAL ELECTION

### ABSTRACT

*General elections are a government program once every five years which are held throughout the territory of Indonesia. The aim of this research is to find out and understand community political participation in the legislative elections in Labuhan Aji Village, and to find out and understand the barriers or obstacles to community participation in the implementation of legislative elections in Labuhan Aji Village. This research is descriptive qualitative research, data collection techniques using interviews, observation and documentation. The results of research on community participation in the legislative election in Labuhan Aji Village show that the number of votes cast in Labuhan Aji Village has decreased compared to the number of votes in the previous election. Voters in Labuhan Aji Village take part in campaign activities because there are entertainment events and expect rewards, but still pay little attention to campaign issues. The inhibiting factors for the participation of beginner voters and ordinary voters are busy daily activities and disappointment with legislative performance. Meanwhile, the driving factor for the participation of first-time voters and ordinary voters is the curiosity and political awareness of voters.*

**Keywords:** *Political Participation, Voting, Legislative General Elections.*

---

## PENDAHULUAN

Negara yang demokratis memiliki keunggulan tersendiri, karena dalam setiap pengambilan kebijakan mengacu pada aspirasi masyarakat (Zarkasi & Rizal, 2020). Masyarakat sebagai pemeran utama dalam sebuah negara demokrasi memiliki peran yang sangat penting. Salah satu peranan masyarakat dalam negara demokrasi adalah partisipasi masyarakat dalam politik. Masyarakat memiliki peran yang sangat kuat dalam proses penentuan orang yang duduk di eksekutif dan legislatif baik di pemerintah pusat maupun daerah (Zarkasi & Rizal, 2020).

Pemilihan umum (Pemilu) merupakan program pemerintah setiap lima taun sekali yang dilaksanakan di seluruh wilayah Negara Indonesia (Rahman et al., 2022). Pemilihan umum menjadi salah satu indikator stabil dan dinamisnya demokratisasi suatu bangsa dalam konteks Indonesia (Irawan, 2020). Penyelenggaraan pemilu memang secara periodik sudah berlangsung sejak awal kemerdekaan bangsa ini. Akan tetapi proses demokratisasi lewat pemilu-pemilu yang terdahulu belum mampu menghasilkan nilai-nilai demokrasi yang matang akibat sistem politik yang otoriter (Arpandi, 2023).

Harapan untuk menemukan format demokrasi yang ideal mulai nampak setelah penyelenggaraan pemilu 2014 lalu yang berjalan relatif cukup lancar dan aman. Untuk ukuran bangsa yang baru beberapa tahun lepas dari sistem otoritarian, penyelenggaraan pemilu 2014 yang terdiri dari pemilu legislatif dan pemilu presiden secara langsung yang berjalan tanpa tindakan kekerasan dan kekacauan (*chaos*) menjadi prestasi bersejarah bagi bangsa Indonesia (Averus & Alfina, 2020).

Dalam pemilu partisipasi politik merupakan aspek penting dalam sebuah tatanan negara demokrasi, sekaligus merupakan ciri khas adanya modernisasi

politik (Dedi & Sudarmo, 2020). Secara umum dalam masyarakat tradisional yang sifat kepemimpinan politiknya lebih ditentukan oleh segolongan elit penguasa. Keterlibatan warga negara dalam ikut serta mempengaruhi pengambilan keputusan, dan mempengaruhi kehidupan bangsa relatif sangat kecil (Husna & Fahrimal, 2021). Warga negara yang hanya terdiri dari masyarakat sederhana cenderung kurang diperhitungkan dalam proses-proses politik (Naufal, 2021).

Partisipasi politik yang meluas merupakan ciri khas modernisasi politik. Istilah partisipasi politik telah digunakan dalam berbagai pengertian yang berkaitan dengan perilaku, sikap dan persepsi yang merupakan syarat mutlak bagi partisipasi politik. Huntington dan Nelson dalam bukunya *Partisipasi Politik di Negara Berkembang* memaknai partisipasi politik sebagai:

*“By political participation we mean activity by private citizens individual atau kolektif, terorganisir atau spontan, mantap atau sporadik, secara damai atau dengan kekerasan, legal atau illegal, efektif atau tidak efektif. designed to influence government decisionmaking. Participation may be individual or collective, organized or spontaneous, sustained or sporadic, peaceful or violent, legal or illegal, effective or ineffective.”*

(Partisipasi politik adalah kegiatan warga Negara yang bertindak sebagai pribadi-pribadi, yang dimaksud untuk mempengaruhi pembuatan keputusan oleh Pemerintah. Partisipasi bisa bersifat individual dan kolektif, terorganisir atau spontan, mantap atau sporadik, secara damai atau dengan kekerasan, legal atau ilegal, efektif atau tidak efektif (Huntington dan Nelson, 1994 : 14).

Dalam konteks pemilihan legislatif (Pileg), partisipasi politik masyarakat saat pemilihan umum juga berorientasi pada

peningkatan kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat. Untuk meningkatkan semua itu, maka warga diminta untuk memilih calon-calon yang ada dan merujuk pada program (Rerung & Attu, 2023). Kegiatan yang ditawarkan oleh para calon pada saat mereka berkampanye. Saat masyarakat menghadiri kampanye dan melihat salah satu calon legislatif menawarkan program kerja yang ternyata relative sama dengan apa yang ada dalam benaknya/preferensinya (tentang kesejahteraan dan pemberdayaan), maka tentu saja masyarakat atau individu tersebut memilih calon tadi (Saputra, 2021).

Tapi pertanyaan yang muncul kemudian, manakala program kerja yang ditawarkan oleh calon-calon tidak cocok dengan prefrensinya. Inilah salah satu tantangan yang dihadapi dalam penyelenggaraan Pemilu di tanah air dewasa ini, yaitu menurunnya tingkat partisipasi politik masyarakat dalam pemilu. Kondisi itu setidaknya dapat terlihat dari beberapa hasil pelaksanaan Pemilu Legislatif (Pileg) sebelumnya, yaitu Pemilu 1999 dengan tingkat partisipasi politik masyarakat mencapai 92,74 persen, Pemilu 2004 dengan 84,07 persen, dan pemilu 2009 dengan tingkat partisipasi masyarakat sebesar 71 persen (Pratama et al., 2022).

Menurunnya tingkat partisipasi masyarakat juga terjadi pada pilkada dan pileg di Sumbawa Besar. Pada tahun 2004, tingkat partisipasi masyarakat mencapai 95%, menurun pada pemilu tahun 2009 menjadi 85% (KPU Sumbawa Besar). Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, KPU Sumbawa Besar memberikan pendidikan politik pada pemilih pemula, simpul keagamaan, perempuan, dan masyarakat yang termajinalkan.

Dalam pendidikan politiknya lebih ditekankan pada hak dan kewajiban sebagai warga negara untuk sadar pentingnya memilih (Luly et al., 2023). Karena masyarakat mempunyai wewenang untuk

“menghakimi” para calon legislatif baik dengan memilih maupun tidak memilih caleg tersebut.

Karena tingkat partisipasi pemilih ini dipengaruhi oleh daftar pemilih tetap. Jika semakin banyak daftar pemilih tetap invalid, maka potensi Golput semakin besar karena adanya pemilihan ganda pemilu legislatif secara langsung pada tanggal 2024 berlangsung serentak di seluruh wilayah Indonesia (Widiyaningrum, 2020). Dalam hasil pemilihan, ternyata masih didapati jumlah masyarakat yang terdaftar sebagai pemilih tetapi tidak menggunakan hak pilihnya pada pemilihan umum legislatif yaitu sekitar 49 %. Padahal jumlah suara yang tidak ikut memilih cukup besar dan sangat berpengaruh pada hasil pemilihan umum legislatif tersebut.

Sedangkan rakyat telah diberikan hak untuk memilih secara langsung calon anggota legislatif periode 2024. Tingginya angka golput disebabkan oleh menurunnya kepercayaan kepada penyelenggaraan pemilu dan peserta pemilu. Alasan masyarakat golput karena mereka sendiri tidak benar-benar mengenali calonnya, mereka kurang pengetahuan tentang bagaimana sistem dan profil para calon pemimpinnya. Maka dari itu penelitian ini ingin menganalisis lebih dalam tentang partisipasi politik masyarakat dalam pemberian suara pada pemilihan umum legislatif tahun 2024 (Sholahuddin et al., 2022).

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Metode penelitian kualitatif adalah metode yang digunakan dalam penelitian untuk meneliti keadaan atau kondisi suatu objek yang secara nyata sesuai dengan yang terjadi atau secara alamiah, analisis sebuah data bersifat induktif, dan dari hasil penelitian kualitatif

lebih menekankan pada makna dari generalisasi (Kurniawan & Suswanta, 2022).

Sedangkan pendekatan deskriptif adalah pendekatan yang menjelaskan fenomena atau karakteristik individual (Kurniawan et al., 2023), situasi atau kelompok tertentu secara akurat. Dengan kata lain pendekatan deskriptif dilakukan untuk mendeskripsikan seperangkat peristiwa atau kondisi populasi saat ini. Teknik Pengumpulan Data dalam penelitian ini adalah dengan wawancara, observasi, dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan dengan cara *data collection, data reduction, data display, conclusion drawing/verificaton*.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu diatur mengenai penyelenggara Pemilihan Umum yang dilaksanakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Sifat nasional mencerminkan bahwa wilayah kerja dan tanggung jawab KPU sebagai penyelenggara Pemilihan Umum mencakup seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sifat tetap menunjukkan KPU sebagai lembaga yang menjalankan tugas secara berkesinambungan meskipun dibatasi oleh masa jabatan tertentu. Sifat mandiri menegaskan KPU dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum bebas dari pengaruh pihak mana pun. Independen dan non partisan inilah label baru yang disandang oleh KPU saat ini (Hardianto et al., 2022).

Anggota tim KPU beranggota orang-orang yang independen dan nonpartisan. Pembentukan KPU yang demikian tidak bisa dilepaskan dengan aktivitas KPU masa lalu, yaitu pada pemilu 1999. Pada saat itu KPU beranggotakan para fungsionaris partai peserta Pemilu. Dalam perjalanan KPU 1999, publik melihat secara jelas bagaimana sangat kuatnya unsur kepentingan (*interest*)

mewarnai setiap kegiatan KPU. Sehingga sangat sering dalam pembahasan keputusan-keputusan KPU harus menghadapi situasi *deadlock* (Simanjuntak et al., 2024).

### A. Partisipasi Masyarakat Desa Labuhan Aji pada Pemberian suara terhadap Pemilu Legislatif

Tingkat partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, yaitu dengan jalan memilih pimpinan negara dan secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintahan negara. Kegiatan ini mencakup tindakan seperti memberikan suara dalam pemilihan, menghadiri rapat umum, menjadi anggota suatu partai atau kelompok kepentingan, mengadakan hubungan dengan dengan pejabat atau anggota parlemen.

Sementara itu dengan UUD1945 Bab I Pasal 1 ayat (2) kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilakukan menurut Undang-Undang Dasar. Tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilihan kepala daerah maupun kepala negara, kini mereka akan menjadi pelaku atau pemilih yang akan menentukan terpilihnya seorang pemimpin yang akan membawa aspirasi masyarakat.

Pemilihan Legislatif secara langsung merupakan salah satu sarana perwujudan partisipasi politik rakyat. Partisipasi politik itu sendiri dapat dijabarkan dalam bentuk-bentuk aktifitas politik yang dilakukan oleh rakyat. Tingkat dan bentuk partisipasi politik seseorang akan tampak dalam aktifitas-aktifitas politiknya. Tingkat partisipasi yang paling umum adalah mengikuti pemungutan suara setiap dapil masing-masing. Entah untuk memilih calon wakil rakyat maupun kepala Negara atau kepala pemerintahan. Tingkat partisipasi masyarakat Desa Labuhan Aji pada pemilu DPR, DPD dan DPRD tahun 2024 dapat dilihat pada tabel I berikut:

Tabel 1. Rekapitulasi Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD DAN DPRD Tahun 2024 Desa Labuhan Aji

No	URAIAN		RINCIAN							
			TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS 4	TPS 5	TPS 6	TPS 7	JML
1.	DATA PEMILIH DAN PENGGUNAAN HAK PILIH									
A.	DATA PEMILIH	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1. Pemilih terdaftar dalam daftar pemilih tetap (DPT)	LK	101	109	102	173	129	118	131	863
		PR	108	112	107	188	123	136	150	924
		JML	209	221	209	361	252	254	281	1787
	2. Pemilih terdaftar dalam daftar pemilih tambahan (DPTb)	LK	1	1	0	0	0	1	0	3
		PR	0	0	0	1	0	0	1	2
		JML	1	1	0	1	0	1	1	5
	3. Pemilih terdaftar dalam daftar pemilih khusus (DPK)	LK	0	0	0	0	1	0	0	1
		PR	0	0	0	0	0	0	1	1
		JML	0	0	0	0	1	0	1	2
	4. Pemilih khusus tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/nama	LK	1	0	0	0	0	0	0	1

Sumber: KPU kabupaten Sumbawa.

Berdasarkan tabel di atas, data pemilih yang terdaftar dalam daftar pemilih tetap (DPT) Untuk Laki-Laki sebanyak 863 calon pemilih, sementara Perempuan sebanyak 924 calon pemilih. Kemudian yang menggunakan hak pilihnya dalam (DPT), untuk laki-laki sebanyak 801 pemilih, sedangkan perempuan sebanyak 863 pemilih. Dengan demikian jumlah daftar pemilih tetap dan pengguna hak pilih di Desa Labuhan Aji, lebih banyak perempuan dari pada laki-laki dalam Partisipasi masyarakat terhadap Pemilihan Umum Legislatif di Desa Labuhan Aji.

Permasalahan dalam penyelenggaraan pemilihan umum legislatif tahun 2024, disebabkan karena banyaknya masyarakat awam yang masih belum memahami dan mengerti mengenai tata cara pencoblosan pada kertas pemilihan umum legislatif baik untuk DPR, DPD, dan DPRD. Terutama masyarakat lansia dan masyarakat pedalaman, sehingga suara tersebut mengalami tidak sah, bahkan sama sekali tidak mencoblos kertas suara tersebut.

Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemilihan umum legislatif di Desa Labuhan Aji pada tahun 2024

mengalami penurunan tingkat partisipasi politik. Sehingga membuat para Calon Legislatif dan Partai Pengusung kecewa terhadap masyarakat pemilih bahkan KPU, dikarenakan KPU Sumbawa dianggap kurang optimal dalam melakukan sosialisasi mengenai pemilihan umum Legislatif.

Berdasarkan hasil wawancara dengan tokoh masyarakat, Kades dan Kadus Desa Labuhan Aji, faktor yang mempengaruhi kurangnya partisipasi politik dalam pemilu legislatif di Desa Labuhan Aji, diantaranya; (1) karena banyak masyarakat lebih memilih bekerja dari pada ikut partisipasi politik yang hanya penuh janji-janji belaka saja, (2) kecewa melihat kinerja legislatif yang kurang maksimal dalam bekerja untuk melakukan perubahan daerah sendiri. Namun ada hal yang perlu dibenahi dari masyarakat, terutama dari segi kurangnya kesadaran dari masyarakat dalam partisipasi pemilu, dalam hal ini tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilu.

#### **B. Faktor Penghambat dan Pendorong Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Pemilu Legislatif di Desa Labuhan Aji**

Kesadaran politik warga Negara menjadi faktor determinan dalam tingkat

partisipasi politik masyarakat, artinya sebagai hal yang berhubungan dengan pengetahuan dan kesadaran akan hak dan kewajiban yang berkaitan dengan lingkungan masyarakat dan kegiatan politik menjadi ukuran dan kadar seseorang terlibat dalam proses partisipasi politik begitu juga dengan pemilih pemula yang baru memasuki usia hak pilih sebagian besar belum memiliki jangkauan politik yang luas untuk menentukan kemana mereka harus memilih.

Untuk menindak lanjuti hal tersebut, peneliti mewawancarai berbagai responden di Desa Labuhan Aji. Peneliti menggali informasi melalui wawancara dari beberapa responden tentang faktor penghambat dan faktor pendorong partisipasi politik pemilih pemula maupun pemilih biasa, hasil penelitiannya dijabarkan sebagai berikut:

### **1. Faktor penghambat partisipasi masyarakat politik**

Ketidakpercayaan masyarakat terhadap parpol dan legislatif, muncul akibat ketidakpercayaan terhadap kinerja dari partai politik maupun legislatif yang selama ini dinilai kurang berpengaruh terhadap pembangunan daerahnya. Parpol dan legislatif dinilai lebih mementingkan diri sendiri maupun partai pengusung, dibandingkan memperjuangkan aspirasi rakyat. Kini dimasyarakat mulai muncul kecenderungan menginginkan figur-figur baru sebagai pemimpin yang menjadi perwakilan masyarakat. Figur baru dinilai lebih bisa memegang amanah, jujur dan profesional dalam jabatannya. Tentunya figur-figur tersebut yang dianggap bisa membawa perubahan untuk masyarakat maupun pembangunan daerah.

Dengan adanya ketidakpercayaan masyarakat terhadap para calon legislatif, dikarenakan masyarakat sudah letih menanti perbaikan dan bosan mendengar dengan janji-janji yang tidak pernah ditepati pada saat kampanyenya. Masyarakat berfikir bahwa mereka hanya sebagai alat atau permainan saja dalam kehidupan para

politisi. Dengan demikian alasan ketidakpercayaan masyarakat terhadap para politik membuat mereka jengkel dan tidak pernah puas akan prilakunya para legislatif sehingga masyarakat kecewa.

Disamping itu pula melihat dinamika para politik tidak berkompetensi, baik dari segi pengetahuan, maupun tingkat pendidikannya. Seringkali para calon legislatif ditemui menggunakan Ijazah Paket C bahkan ada juga tidak paham arti sebuah kelembagaan tata Negara antara hubungan pemerintah daerah dengan Legislatif. Dengan demikian mereka kecewa dengan partai politik yang saat ini tidak selektif dalam menentukan kandidat untuk kepentingan rakyat yang hanya dipikirkannya adalah siapa banyak uangnya dan siapa banyak jaringan atau berpengaruh.

Masyarakat juga sudah tidak percaya lagi karena banyaknya kebohongan didalam kampanye yang mereka lakukan. Mereka hanya seolah melakukan pencitraan saja tidak benar-benar bertindak untuk memajukan bangsa. Sehingga masyarakat beranggapan ikut atau tidak dalam Pemilu tidak memberikan perubahan yang berarti bagi kehidupan keluarga.

Bahkan untuk mendapatkan kepercayaan masyarakat terhadap partai politik dan calon legislatif, diperlukan upaya dengan menggunakan caranya masing-masing. Entah itu tindakan membagi-bagi uang atau barang milik pribadi maupun partai politik sendiri, praktik semacam itu merupakan salah satu tindakan kejahatan dalam Pemilu.

Masyarakat Desa Labuhan Aji lumayan aktif dalam matapencaharian setiap hari, kegiatan pemilih yang kompleks dalam kegiatan sehari-hari digunakan untuk memenuhi tanggung jawab mereka terhadap pribadinya, maupun keluarganya. Kesibukan tersebut selalu menjadi faktor utama yang menghambat keterlibatan mereka dalam kegiatan Pemilihan Umum. Masyarakat lebih memilih untuk melaksanakan

kegiatannya dari pada harus ikut serta dalam urusan Pemilu.

Hal ini diungkapkan oleh responden dari Desa Labuhan Aji: *“mengatakan bahwa tugas utamanya bekerja memenuhi kebutuhan keluarganya, dan kewajiban warga untuk mensukseskan pemilu adalah untuk memilih di TPS itu saja sudah cukup. Kemudian untuk mengurus atau ikut kegiatan-kegiatan yang lainnya menurutnya sudah ada tugasnya sendiri dan tidak perlu repot untuk ikut terlibat.”*

Dari pernyataan responden diatas dapat kita simpulkan bahwa, faktor penghambat ini menjadi penghalang antusias warga dalam pemilihan kepala daerah maupun pemilihan wakil rakyat. Hal tersebut juga yang menjadikan para pemilih pemula enggan melakukan kegiatan politik yang umumnya menyita waktu banyak. Tuntutan bekerja seringkali menjadi alasan utama bagi para pemilih pemula di Desa Labuhan Aji sehingga enggan melakukan kegiatannya dibidang politik.

Kenyataan tersebut sebenarnya dapat disiasati dengan cara pembagian waktu antara bekerja dengan melakukan kegiatan politik dimasyarakat. Keikutsertaan pemilih dalam dunia politik, bagi para pemilih biasa maupun pemilih pemula adalah suatu hal yang istimewa. Sehingga ada pendapat bahwa yang berhak untuk terjun didalamnya adalah orang-orang kaya, berpendidikan, ataupun orang yang sudah berpengalaman dalam dunia politik.

Pendapat responden dari Naseriani (28 tahun) menyatakan: *“malu untuk ikut dalam jajaran anggota panitia karena untuk menjadi paniti harus bisa berbicara didepan umum dan harus bisa berhadapan dengan orang banyak”*. Pendapat yang sama diungkapkan oleh khaidir (25 tahun) *“mengungkapkan bahwa untuk menjadi panitia belum berani karena takut kalau nanti terjadi kesalahan karena sama sekali belum pernah terlibat dalam kepanitiaan Pemilu, dan menurutnya panitia akan lebih baik jika di isi oleh orang-orang yang lebih tua dan berpengalaman.”*

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa tingkat partisipasi para pemilih sangat sedikit, dimana hal tersebut karena tingkat pendidikan yang rendah atau minimnya pengalaman dalam kegiatan politik maupun tingkat sosial ekonomi yang rendah. Menurut mohtar mas' oed disamping pendidikan dan sosial ekonomi perbedaan jenis kelamin juga mempengaruhi keaktifan seorang dalam berpartisipasi politik. Misalnya laki-laki dan lebih aktif berpartisipasi dari pada wanita, orang yang berstatus ekonomi sosial tinggi lebih aktif dari pada yang berstatus rendah.

Mereka merasa tidak berhak tampil dalam kegiatan politik dari pada mereka yang punya status sosial ekonomi yang lebih tinggi dan pengalamn yang memadai. Mereka menyadari bahwa kenyataan yang ada dalam masyarakat adalah politik lebih berhak bagi mereka yang punya pengalaman dan mempunyai status sosial ekonomi yang cukup. Dengan adanya gejala seperti ini mereka akan merasa lebih aman dan nyaman jika hanya berada disektor privat.

## **2. Faktor pendorong partisipasi masyarakat politik**

Pemilih pemula adalah kelompok pemilih yang belum mempunyai pengalaman dalam pesta demokrasi. Kesemarakan pemilu di negeri ini menjadi sebuah pengalaman tersendiri bagi kelompok pemilih pemula. Pengalaman yang minim dalam pesta demokrasi juga bisa menjadikan kelompok pemilih pemula ingin ikut ambil andil dalam pesta demokrasi dan ingin merasakan secara langsung keterlibatan mereka dalam kegiatan pemilu.

Dalam wawancara peneliti dengan responden yang bernama Ulil Amri (18 tahun) *“menyatakan bahwa dirinya baru pertama kali ini melakukan kegiatan pemilu sehingga dia tidak akan melewatkan untuk datang ke TPS memberikan hak suaranya untuk memilih kepala daerah sekaligus*

*merasakan pengalaman yang baru mereka alami.”*

Dari pengakuan responden diatas dapat kita simpulkan bahwa mereka sangat besar antusiasnya dalam dalam pemilihan ini karena dia menganggap hal seperti ini sangat istimewa, karena mereka sebelumnya hanya sebagai penonton proses politik. Kini mereka akan menjadi pelaku atau pemilih yang akan menentukan terpilihnya seorang calon legislatif. Dari sinilah rasa keingintahuan pemilih pemula untuk ikut andil dalam pesta demokrasi dan ingin merasakan secara langsung keterlibatan mereka dalam pemilu.

Miriam budiarjo menyebutkan tingkat partisipasi politik adalah kegiatan seorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, yaitu dengan jalan memilih pimpinan Negara dengan secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintahan negara.

Dari sini dapat disimpulkan bahwa pemilih pemula di Desa Labuhan Aji secara langsung sudah ikut dalam berpartisipasi politik secara aktif yaitu dengan cara memilih calon legislatif dalam proses pemilu. Kegiatan pemilihan umum yang dilakukan oleh pemilih pemula sudah termasuk dalam kategori berpartisipasi politik karna didasari oleh kesadaran mereka sendiri dan juga secara tidak langsung kegiatan pemilihan umum yang dilakukan sudah mempengaruhi kebijakan Negara.

Kesadaran pemilih pemula maupun pemilih biasa untuk ikut berpartisipasi dalam pemilihan anggota calon legislatif di Desa Labuhan Aji cukup baik. Mereka mengaggap bahwa peran serta mereka untuk mensukseskan pemilihan harus mereka lakukan karena mereka juga adalah bagian dari warga Negara Indonesia. Anggapan pemilih pemula maupun pemilih biasa bahwa orang yang sudah cukup umur dan

sudah tredaftar dan diberi undangan untuk dating ke TPS adalah suatu keharusan.

Sudah banyak yang mempunyai keinginan bahwa mereka harus mensukseskan pemilihan kepala daerah yang diselenggarakan di daerahnya untuk membawa daerahnya kearah yang lebih baik. Kenyataan ini menyebabkan mereka untuk ikut serta dalam pemilihan umum, khususnya pemungutan suara. Kesadaran karena adanya kewajiban inilah yang membuat mereka ikut serta dalam kegiatan Pemilu

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa Partisipasi politik pemilih dalam pemilihan anggota legislatif pada tahun 2024 di Desa Labuhan Aji mengalami penurunan. Dikarena masih kurang maksimalnya usaha aparat yang bertugas untuk melakukan penyuluhan atau sosialisasi, dan banyak kaum lansia, masyarakat yang berpindah seperti perantau, mahasiswa,dll.

Faktor penghambat partisipasi politik dalam pemilihan anggota legislatif, merupakan kesibukan kegiatan sehari-hari dan merasa dibohongi oleh janji-janji politik. Sedangkan pendorong adalah pertama rasa ingin tahu pemilih pemula yang sebelumnya hanya sebagai penonton proses politik, kini mereka akan menjadi pelaku atau pemilih yang akan menentukan terpilihnya seorang kepala daerah.

Dari sinilah rasa keingintahuan pemula untuk ikut andil dalam pesta demokrasi dan ingin merasakan secara langsung keterlibatan mereka dalam pemilu. Kedua, kesadaran politik para pemilih. Hal ini dikarenakan pemilih pemula maupun pemilih biasa mempunyai keinginan untuk kesuksesan pemilihan yang diselenggarakan untuk membawa daerahnya kearah yang lebih baik.



**DAFTAR PUSTAKA**

- Arpandi, A. (2023). Media Online dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat pada Pemilihan Umum (Pemilu). *Edu Society: Jurnal Pendidikan, Ilmu Sosial Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(1), 843–855.  
<https://doi.org/10.56832/edu.v3i1.293>
- Averus, A., & Alfina, D. (2020). Partisipasi Politik Dalam Pemilihan Kepala Desa. *Jurnal MODERAT*, 6(3), 591–605.  
<https://jurnal.unigal.ac.id/moderat/article/view/3996>
- Dedi, A., & Sudarmo, U. R. (2020). Partisipasi Politik Pemilih Disabilitas di Kabupaten Ciamis pada Pemilu Serentak Tahun 2019. *Jurnal MODERAT*, 6(1), 14–28.  
<https://jurnal.unigal.ac.id/moderat/article/view/3318>
- Hardianto, W. T., Sili, A. P., & Firdausi, F. (2022). Analisis Peran Komisi Pemilihan Umum (Kpu) Kota Batu Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat (Studi Pada Pemilihan Presiden Tahun 2019 Di Kpu Kota Batu). In *JISIP : Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* (Vol. 11, Issue 2, pp. 144–151). academia.edu.  
<https://doi.org/10.33366/jisip.v11i2.2508>
- Husna, A., & Fahrimal, Y. (2021). Pendidikan Politik: Upaya Peningkatan Partisipasi Pemilih Pemula Dalam Menggunakan Hak Pilihnya. In *Jurnal Pengabdian Masyarakat: Darma Bakti Teuku Umar* (Vol. 3, Issue 1, p. 85). academia.edu.  
<https://doi.org/10.35308/baktiku.v3i1.3437>
- Irawan, A. D. (2020). Pendidikan Pemilih Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pemilihan Umum Serentak 2019. *Jurnal Hukum Replik*, 7(1), 55.  
<https://doi.org/10.31000/jhr.v7i1.2448>
- Kurniawan, C., Pribadi, U., & Iqbal, M. (2023). the Role of E-Governance in Improving Local Governments Performance (Case Study: Sumbawa Regency). *Jurnal Ilmiah Peuradeun*, 11(3), 1139–1154.  
<https://doi.org/10.26811/peuradeun.v11i3.795>
- Kurniawan, C., & Suswanta, S. (2022). Implementation of Artificial Intelligence by the Government of West Nusa Tenggara (NTB) in Disaster Management. *International Conference on Public Organization (ICONPO 2021)*, 209(Iconpo 2021), 39–44.
- Luly, L. R., Lopian, M. T., & Lambey, T. (2023). Partisipasi Politik Masyarakat Sangahe Pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2017 Di Kecamatan Manganitu. *Jurnal Eksekutif*.  
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jurnaleksekutif/article/view/47569%0Ah>  
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jurnaleksekutif/article/download/47569/42234>
- Naufal, S. (2021). Pengaruh Tingkat Pendidikan Terhadap Partisipasi Politik Pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2018. In *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents* (Vol. 3, Issue 2). repository.unsoed.ac.id.  
<http://repository.unsoed.ac.id/id/eprint/9291>
- Pratama, A. F., Juwandi, R., & Bahrudin, F. A. (2022). Pengaruh Literasi Politik dan Informasi Hoax terhadap Partisipasi Politik Mahasiswa. In *Journal of Civic Education* (Vol. 5, Issue 1, pp. 11–24). download.garuda.kemdikbud.go.id.  
<https://doi.org/10.24036/jce.v5i1.662>
- Rahman, A., Latifah, E. D., & Fachrurrazi, S. (2022). Peranan Teknologi Informasi Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Warga Negara. *Sisfo: Jurnal Ilmiah*

- Sistem Informasi*, 6(1), 12.  
<https://doi.org/10.29103/sisfo.v6i1.7961>
- Rerung, A. E., & Attu, J. (2023). Sikap Gereja Terhadap Partisipasi Politik dan Relevansinya Bagi Gereja Toraja Mamasa Jemaat Sapankale. *KINAA: Jurnal Kepemimpinan Kristen Dan Pemberdayaan Jemaat*, 4(1), 1–17.  
<https://doi.org/10.34307/kinaa.v4i1.48>
- Saputra, A. F. (2021). Pemilu Dan Partisipasi Politik: Studi Atas Partisipasi Masyarakat Dalam Pilpres Di Kecamatan Pondok Melati Kota Bekasi 2019. *Repository.Uinjkt.Ac.Id*.  
[https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/63056%0Ahttps://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/63056/1/ALIEF\\_FEBRYAN\\_SAPUTRA.IP.pdf](https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/63056%0Ahttps://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/63056/1/ALIEF_FEBRYAN_SAPUTRA.IP.pdf)
- Sholahuddin, A. H., Anjarwati, S., & Amalia, S. (2022). Peningkatan Partisipasi Politik pada Pemilih Pemula di Kabupaten Blitar. *Prosiding Seminar Nasional Pengabdian Masyarakat Universitas Ma Chung*, 2(4), 169–175.  
<https://ocs.machung.ac.id/index.php/senam/article/view/345>
- Simanjuntak, V. H. P., Kariem, M. Q., & ... (2024). Pendidikan Politik dan Peningkatan Partisipasi Politik Masyarakat Muda Provinsi Sumatera Selatan Melalui Rumah Pintar Pemilu Sriwijaya Di Pra Pemilu. *Jurnal Ilmiah Wahana* ....  
<http://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/6903>
- Widiyaningrum, W. Y. (2020). Partisipasi Politik Kader Perempuan Dalam Bidang Politik: Sebuah Kajian Teoritis. *JISIPOL | Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 4(2), 126–142.  
<https://www.ejournal.unibba.ac.id/index.php/jisipol/article/view/296>
- Zarkasi, A., & Rizal, D. (2020). Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Walikota Jambi Periode Tahun 2018-2023 Di Kecamatan Telanaipura Kota Jambi. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)*, 4(3).  
<https://doi.org/10.58258/jisip.v4i3.1173>